



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 11 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2--4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3849388; Faksimile (021) 3448390. Laman www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S-1511 /KN/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

07 NOV 2017

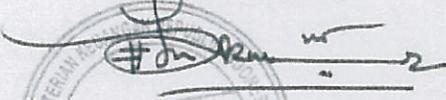
Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 8 PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara diatur bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab diantaranya mengoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN pada lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan dan melaksanakan tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar mengacu juga pada Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN sebagaimana ditetapkan dalam lampiran surat ini.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya.

Direktur Jenderal,


Isa Rachmatarwata
NIP 19661230 199102 10014

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktur Barang Milik Negara;
3. Direktur Penilaian.

Lampiran I
Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Nomor : S-1511/KN/2017
Tanggal : 7 Nov 17

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
3. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
5. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia
6. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
10. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
15. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
16. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
17. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
19. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
20. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
21. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
22. Kepala Badan Pelaksana - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
23. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
24. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
25. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
26. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
27. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
28. Sekretaris Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
29. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
30. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
32. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
33. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
34. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
35. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
36. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
37. Deputi Bidang Administrasi dan Perencanaan Badan Pengusahaan Batam
38. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
39. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
40. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
42. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
43. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
44. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

45. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
46. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
47. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
48. Sekretaris Jenderal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
49. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
50. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
51. Sekretaris Badan SAR Nasional
52. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
53. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
54. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
55. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
56. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
57. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
58. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
59. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
60. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata
61. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM
62. Sekretaris Perpustakaan Nasional
63. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
64. Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana
65. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
66. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
67. Sekretaris Utama Komisi Pemilihan Umum
68. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
69. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
70. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
71. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
72. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
73. Sekretaris Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
74. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
75. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
76. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI
77. Kepala Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu
78. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
79. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
80. Kepala Otorita Asahan
81. Direktur Jenderal Anggaran (BA 999.08)